



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan yang sudah diberikan. Dan kepada para pihak lainnya yang sudah terlibat dalam penyusunan, turut kami ucapkan terima kasih .

Pada tahun anggaran 2025, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Tahun 2025 serta pembahasannya.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 ini mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 14 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami sadar bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 20 Januari 2026
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Zaki Mubarak

ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan.....	2
c. Tugas dan Fungsi	2
d. Sumber Daya Manusia.....	3
e. Potensi.....	3
f. Permasalahan dan Tantangan	4
g. Strategi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal	5
b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	5
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025.....	6
d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	12
IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	15
IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	17
IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	20
IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP.....	23
IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	26
IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	31
IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	34
IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN	38
IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	40
IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	42
IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	44

IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	46
IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	47
Realisasi Anggaran.....	48
Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2024	48
a. Efisiensi penggunaan sumber daya di dalam Laporan Kinerja	49
b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai umpan balik Perencanaan 2026	50
c. Penghargaan.....	51
d. Penyesuaian Anggaran	52
e. Evaluasi pencapaian kinerja	53
f. Perubahan budaya kinerja.....	53
BAB IV PENUTUP	55
Kesimpulan	55
Saran	56
LAMPIRAN	57
Perjanjian Kinerja Biro HKLN Januari 2025	57
Perjanjian Kinerja Biro HKLN April 2025	60
Perjanjian Kinerja Biro HKLN Desember 2025	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Biro HKLN.....	3
Gambar 2 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku Tahun 2025 untuk akun Biro HKLN	10
Gambar 3 <i>Screen capture</i> Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025	11
Gambar 4 Pertemuan bilateral antara Menteri KP Republik Indonesia dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia pada tahun 2025	14
Gambar 5 Kegiatan CTI-CFF Senior Official Meeting ke-20 di Bali, Indonesia	19
Gambar 6 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP berpidato dalam forum bergengsi Our Ocean Conference 2025 di Busan, Korea Selatan.....	19
Gambar 7 KKP News Edisi November 2025	25
Gambar 8 KKP News Edisi Desember 2025	25
Gambar 9 Tangkapan layar aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id untuk memverifikasi Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025	27
Gambar 10 Pertemuan Para Pejabat dan Staff KKP Dalam Rangka Penilaian Mandiri Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2025	29
Gambar 11 Penyampaian Materi Sosialisasi Oleh Pakar Keterbukaan Informasi Publik	30
Gambar 12 Kerja Keras Tim Kerja Layanan Informasi berbuah manis dengan diterimanya penghargaan Kategori Informatif untuk Kementerian pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 oleh Komisi Informasi Publik	30
Gambar 13 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan Wamen KP.....	33
Gambar 14 Layanan Hubungan Lembaga Biro HKLN kepada Menteri KP dan Ketua Komisi IV DPR RI	33
Gambar 15 Pemberian Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada para siswa TK Istiqlal Jakarta	36
Gambar 16 Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada Mahasiswa Oseanografi ITB.....	37
Gambar 17 Layanan Prima Perpustakaan KKP Dalam Sesi Berbagi <i>Bookclub</i>	37
Gambar 18 <i>Screen capture</i> Nilai IP ASN 2025 lingkup Sekretariat Jenderal.....	41
Gambar 19 <i>Screen capture</i> hasil Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025.....	43
Gambar 20 <i>Screen capture</i> hasil Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025.....	45
Gambar 21 <i>Screen capture</i> realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025	48
Gambar 22 Penghargaan Komisi Informasi Pusat untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan	52
Gambar 23 Pejabat Pimpinan Tinggi KKP menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat	52
Gambar 24 Rutinitas Doa Bersama Sekali Sepekan Sebagai Salah Satu <i>Improvement</i> sekaligus Inovasi Sosiokultural Biro HKLN yang dapat menunjang kinerja individu dan organisasi	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Tahun 2025	3
Tabel 2 Sasaran Program/Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029	5
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025	6
Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025	8
Tabel 5 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Tahun 2025	9
Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2025	12
Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2018 s.d. 2024	12
Tabel 8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025	15
Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Tahun 2018 s.d. 2024	15
Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	17
Tabel 11 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2018 s.d. 2024	17
Tabel 12 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	20
Tabel 13 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 s.d. 2024	20
Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	23
Tabel 15 Target dan Realisasi IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP tahun 2028 s.d 2024	23
Tabel 16 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	26
Tabel 17 Target dan Realisasi IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	26
Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025	31
Tabel 19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 s.d. 2024	31
Tabel 20 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan ...	35
Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 s.d. 2024	35
Tabel 22 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025	38
Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2018 s.d. 2024	38
Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025	40
Tabel 25 Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 s.d 2024	40
Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025	42
Tabel 27 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 s.d 2024	42
Tabel 28 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2025	44

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2018 s.d. 2024.....	44
Tabel 30 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025	46
Tabel 31 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2018 s.d. 2024	46
Tabel 32 Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2024.....	47
Tabel 33 Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2017 s.d 2024	47
Tabel 34 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2026.....	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam Peraturan tersebut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator atau penjemabatan secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan counterpart dari negara asing mitra Indonesia dan dengan organisasi kerja sama regional dan internasional. Selain itu Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berperan secara vertikal yaitu mediator arus informasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kepada publik umum serta menjadi hub informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri merelasikan kebijakan Menteri dan pimpinan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan publik eksternal di dalam dan di luar negeri (serta kepada publik internal Kementerian) juga memiliki nilai strategis yang tidak kalah penting.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait, pada tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dieksplisitkan ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah.

Strategi yang telah dilakukan Biro HKLN memenuhi target semua IK pada periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN
- b. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Biro Perencanaan yang adalah unit kerja pemerintah pembina pengelolaan kinerja di KKP serta merupakan *think tank* pembangunan sektor perikanan dan sektor kelautan Indonesia
- c. Memastikan para pejabat yang bertanggung jawab langsung pada pelaksanaan IK dan semua bawahannya ingat akan target IK untuk dipenuhi tahun 2025, dan
- d. Menemukan solusi jika terdapat kemungkinan target IK di tahun 2025 tidak tercapai sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN pada Tahun 2025 adalah 104,41. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Biro HKLN memperoleh predikat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN juga memuat pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh tim kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pada setiap triwulan kepada ketua tim kerja dukungan manajerial Biro HKLN. Selanjutnya kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem elektronik yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Program Sekretariat Jenderal KKP 2025 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP
- PNPB BLU sektor KP meningkat

Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KKP 2025 adalah:

1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP
2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP
5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP
6. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal
8. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal
9. Persentase Pencapaian Target PNPB Layanan LPMUKP
10. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

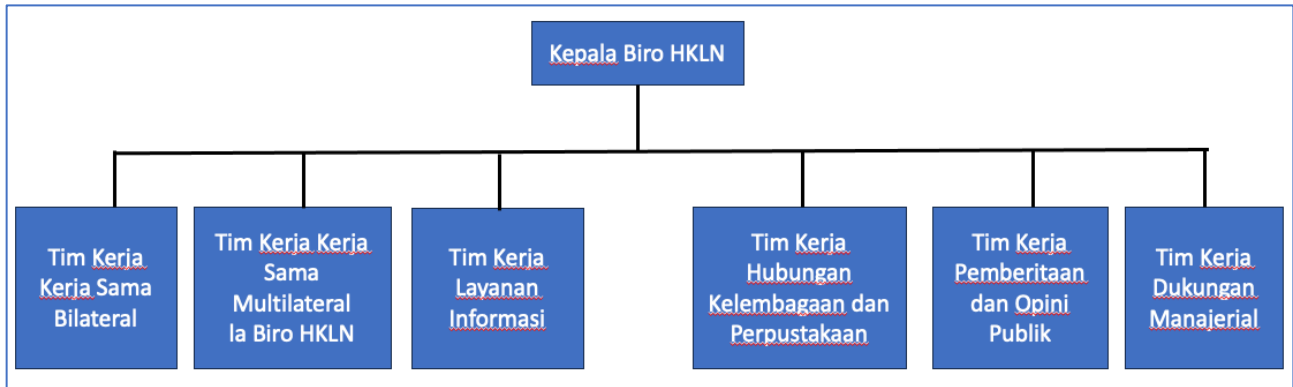
c. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi Biro HKLN:

- a. penyiapan koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- b. penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- d. penyiapan koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- e. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan; penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- f. penyiapan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Gambar 1 Struktur Biro HKLN



Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi secara eksklusif tetapi visi, misi, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP. Rumusan visi Sekretariat Jenderal KKP adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional" untuk mewujudkan "Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". Sedangkan misi Sekretariat Jenderal adalah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia".

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Tahun 2025 berjumlah 79 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Tahun 2025

No	Berdasarkan Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	PNS	43
2	PPPK	14
3	PPNPN	3
4	PJLP	18
5	Diperbantukan dari Ditjen Budi Daya (PPPK)	1
No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	42
2	Perempuan	37
Jumlah		79

e. Potensi

Potensi yang dimiliki Biro HKLN dalam melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait adalah:

- Komitmen kuat dari Kepala Biro HKLN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Sumber daya manusia pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berintegritas, handal, tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro HKLN
- Lebih dari 80% atau mayoritas sumber daya manusia Biro HKLN menyelesaikan pendidikan jenjang perguruan tinggi. Diantaranya perguruan tinggi nasional bergengsi seperti Sekolah

Tinggi Perikanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta beberapa perguruan tinggi di negara maju yang tersebar di Inggris, Jepang, Australia, dan Korea Selatan

- d. Biro HKLN memiliki *network* nasional dan internasional yang luas termasuk dengan organisasi-organisasi multilateral/kerja internasional bergensi seperti PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, ILO, IMO, ASEAN, Uni Eropa, dan CTI-CFF yang bermanfaat dalam mendukung ekspansi pasar dan negosiasi dagang komoditas kelautan dan perikanan Indonesia
- e. Sumber daya manusia Biro HKLN yang bergerak dalam bidang komunikasi publik dan kehumasan adalah asset unggul, berharga dan berpengalaman yang dimiliki KKP dan di tahun 2024 menunjukkan prestasi memenangkan peringkat/*score* tertinggi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- f. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai sebagai anugerah kinerja, pelaksanaan komitmen dan kemurahan petinggi KKP dan pimpinan Biro HKLN.

f. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) adalah permasalahan utama dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu Biro HKLN merumuskan bahwa isu strategis atau permasalahan, hambatan dan tantangan juga adalah kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN.

Adapun isu strategis menantang yang telah diidentifikasi untuk tahun 2025 adalah kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy dimana hal tersebut yang tidaklah selalu mudah di lapangan terutama dikarenakan faktor eksternal yang sangat dinamis. Isu strategis lainnya adalah pentingnya untuk memelihara fungsi hubungan masyarakat sebagai sarana dan *hub* komunikasi KKP bersama dengan masyarakat.

g. Strategi

Strategi yang diambil dan/atau dipilih Biro HKLN menghadapi dan mengatasi permasalahan dan tantangan adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN;
- b. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Kepala dan para pejabat Biro Perencanaan KKP yang notabene merupakan unit kerja pembina manajemen kinerja di KKP sekaligus *think thank* pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- c. Memastikan semua pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan IKK beserta bawahannya tidak pernah lalai akan tanggung jawab pemenuhan target IKK Biro HKLN diantaranya melalui komunikasi informal; dan
- d. Menemukan solusi jitu jika ada kemungkinan tidak tercapainya pemenuhan target IKK pada setiap periode (triwulanan, semesteran dan tahunan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, Sekretariat Jenderal KKP berperan mengawal Sasaran Strategis “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP” yang diwujudkan melalui penguatan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi di seluruh unit organisasi KKP. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2 Sasaran Program/Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	1	Nilai RB general KKP (Nilai)	84,8	84,85	84,9	84,95	85
		2	IP ASN lingkup KKP (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
		3	Nilai keterbukaan informasi publik KKP (Nilai)	97	97,25	97,5	97,75	98
		4	NKPA KKP (nilai)	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		5	Nilai Hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai)	77	78	79	80	81
		6	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%)	85	86	87	88	89
		8	Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (Nilai)	76	77	78	79	80
2	PNBP BLU Sektor KP meningkat	9	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	97	97,2	97,5	97,8	98
		10	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	90	91	92	93	94

Indikator kinerja program Setjen yang menjadi tanggungjawab Biro HKLN adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP.

b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Biro HKLN melakukan 3 (tiga) kali penandatanganan Perjanjian Kinerja yaitu pada:

1. Tanggal 24 Januari 2025,
2. Tanggal 29 April 2025 dikarenakan pergantian Kepala Biro HKLN,
3. Tanggal 2 Desember 2025 dikarenakan perubahan besar target indikator kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani tanggal 2 Desember 2025, Biro HKLN pada tahun anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.711.588.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Substansi Perjanjian Kinerja yaitu Sasaran Kegiatan dan butir-butir Indikator Kinerja dan targetnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diperoleh Biro HKLN sebagai hasil pelaksanaan seluruh Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN pada akhir tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, rumusan sasaran Biro HKLN pada tahun 2025 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri
- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik
- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN

Dalam rangka mewujudkan dan memungkinkan terukurnya sasaran-sasaran di atas maka seluruh dibentuklah Indikator Kinerja yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif supaya memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja. Butir-butir Indikator Kinerja juga merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari informasi kinerja Biro HKLN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN;
- Membantu pihak yang ingin merumuskan penganggaran yang berbasis pada kinerja;
- Memudahkan Biro HKLN untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung;
- Mengubah paradigma kerja menjadi kinerja;

- Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Biro HKLN untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia;

Manfaat lainnya dari informasi kinerja adalah terbentuknya paradigma bahwa program dan kegiatan memiliki output dan outcome yang jelas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih jelas keefektifan dan keefisiensiannya. Implikasinya adalah seluruh jajaran Biro HKLN terpacu untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Selain itu, Biro HKLN turut semakin mampu memberikan pelayanan kepada publik internal KKP dengan baik

d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Keselaran dalam perencanaan indikator kinerja pada hakikatnya turut menjadi prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Detil indikator kinerja Biro HKLN tahun 2025 dan target indikator kinerja Tahun 2025 yang disandingkan dengan tahun terakhir pada Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Renstra Setjen 2025-2029
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	97
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	92
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	96
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	99
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	98
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	97
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	94
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	87,8
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82	84
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	89
		13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Dukungan Manajerial Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan KKP. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per 15 Januari 2026.

Tabel 5 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	100	105,28
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	92,94	105,61
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	100	107,53
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	100	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	100	103,09
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	100	104,17
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	99,51	104,75
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	95,37	105,97
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	87	100
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82	85,64	104,44
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	100	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	100	117,65
		13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	100	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	98,72	103,92

Gambar 2 Screen capture aplikasi kinerjaku Tahun 2025 untuk akun Biro HKLN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

 e-Kinerja
 [Home](#)

Kamis, 15 Januari 2026
 

NKO Desember - 2025

Download

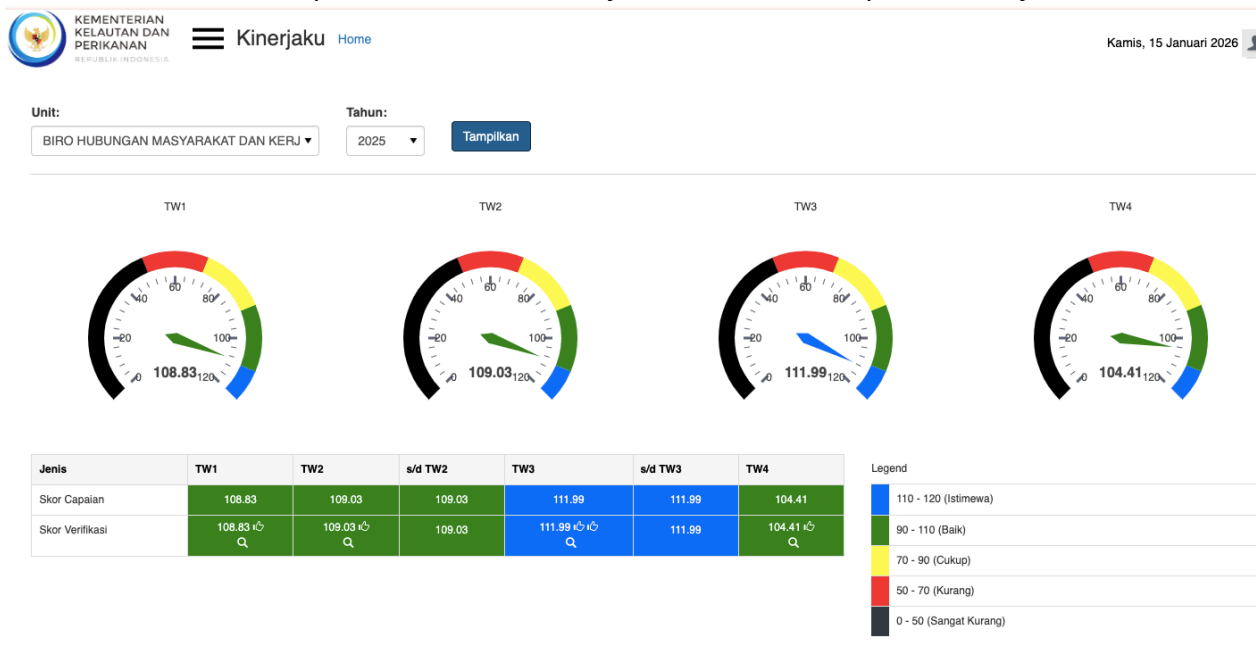
Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI
 Skor Kinerja : **104.41**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri						104,80		
IKSK.1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang diindikasikan/juti Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	02-Jan-2026 14:37
IKSK.2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	92,94	105,61	02-Jan-2026 14:37
IKSK.3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Akumulasi	93,00	93,00	100,00	107,53	02-Jan-2026 14:37
IKSK.4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%) Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik						104,28		
IKSK.02.1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	97,00	100,00	103,09	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.2	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,00	96,00	100,00	104,17	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.3	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	99,51	104,75	02-Jan-2026 14:37
IKSK.02.4	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	95,37	105,97	02-Jan-2026 14:37
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN						104,35		
IKSK.03.1	Nilai PM SAKIP Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	87,00	87,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	85,64	104,44	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.3	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.5	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	02-Jan-2026 14:37
IKSK.03.6	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Data Dukung ✓  Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	98,72	103,92	02-Jan-2026 14:37

Tutup

Gambar 3 *Screen capture* Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerja Tahun 2025



Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025-2029 (jika ada);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) atau menunjukkan peringkat KKP berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Kementerian/Lembaga secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama tahun 2025.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan lembaga terkait.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian.
8. Indikator Kinerja yang bersifat tahunan dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini dengan menyampaikan progres telah dilakukan hingga akhir tahun.

IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan tindak lanjut atau implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional

Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025- 2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	97%	nihil	103,69%

Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	100%	95%	100%

IKK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di tahun 2025 sebesar 95%.

Pada tahun 2025, terdapat 21 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 21 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation
2. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain;
3. Maritime and Fisheries Surveillance System Project Spain - KKP
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme
5. Plan of Action Strategic Partnership RI - Perancis
6. Technical Cooperation Agreement Proyek Kerja Sama ALDFG KKP – AFD
7. Eco Fishing Port Project;
8. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022
9. Joint Declaration Indonesia - Norwegia
10. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD
11. Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia
12. Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of England concerning Cooperatives Activities in Maritime Affairs ;
13. Blue Planet Fund

14. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates
15. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA
16. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia
17. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission
18. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation;
19. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation
20. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation
21. MoU in the Fields of Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Arab Saudi

Hingga akhir tahun 2025, dari 21 dokumen kerja sama bilateral, seluruhnya atau ke-21 dokumen kerja sama telah ditindak lanjut. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' pada tahun 2025 menjadi 100%. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah 95% maka capaian adalah 105,26% berdasarkan aplikasi kinerja yang menghitung dan menetapkan capaian untuk IK.

Dibandingkan dengan target di tahun akhir Rencana Strategis 2025-2029 yaitu 97%, persentase capaian IK ini menjadi 103,69%. IK ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan. Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN yang andal dan berpengalaman, oleh karena itu tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Tim Kerja Sama Bilateral memenuhi target IKK ini adalah:

- Beberapa kegiatan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa , Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah pelaksanaannya sesuai atau lebih awal daripada jadwal indikatif penyelenggaraan melalui pertemuan yang dilakukan baik secara virtual dan melalui tatap muka;
- Hubungan internasional dalam konteks kerja bilateral sektor kelautan dan perikanan selama ada tahun 2025 dapat diimplementasikan bahkan beberapa lebih awal daripada jadwal yang direncanakan karena fakta bahwa keikutsertaan KKP dalam fora kerja sama bilateral melalui Biro HKLN dalam rangka implementasi diplomasi biru di bidang kelautan dan perikanan dan peran serta posisi Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina hubungan internasional di lingkup KKP dipandang penting dan sangat diperhitungkan serta sering menjadi mediator berpengalaman di KKP; dan
- Posisi dan keberadaan KKP yang mewakili Republik Indonesia dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di forum bilateral selalu dipandang strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini tercermin dari partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri seperti pertemuan bidang kelautan dan perikanan atau pendampingan dan supervisi

Biro HKLN dalam kegiatan kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah. Sumbangsih pemikiran dari para pejabat dan pegawai Biro HKLN di forum bilateral yang dihadiri KKP kerap diakui kreatif, inovatif, *out of the box* dan menawarkan solusi. Hal ini setidaknya nampak dari penyambutan, penanggapan dan penerimaan yang positif dari negara mitra, dan oleh organisasi-organisasi kerja sama regional dan multilateral, serta juga dibuktikan melalui apresiasi terhadap substansi dokumen kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia yang diajukan dan dipantau oleh delegasi Biro HKLN.

Tidak ada kendala serius yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi target IKK selama tahun 2025. Rencana aksi untuk tahun 2026 adalah kegiatan-kegiatan yang meneruskan penindaklanjutan dokumen kerja sama bilateral yang aktif. Penindaklanjutan tersebut didasarkan arahan dan bimbingan dari pimpinan Biro HKLN. Tidak ada laporan resmi bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Biro HKLN baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia.

Gambar 4 Pertemuan bilateral antara Menteri KP Republik Indonesia dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia pada tahun 2025



IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh Biro HKLN diperoleh dari survei kepuasan pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Responden pengisi kuesioner khususnya adalah narahubung PDLN dan/atau pelaku PDLN (jika memungkinkan) di unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	92,94%	105,61%	88%	88,11%	100,13%	92%	nihil	103,27%

Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	87,45%	88%	88,89%

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada tahun 2025 telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yaitu masing-masing sebesar 92,94% dan 105,61%. Jika dibandingkan dengan hasil realisasi dan capaian IK yang sama dengan tahun 2024 maka pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir pada jangka menengah dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, maka capaian IKK ini sebesar 103,27%

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan II 2025. Untuk mengetahui kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online pada tahun 2025 memakai aplikasi google forms survey. Terdapat 24 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisisioner.

Pertanyaan disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas pelayanan di tengah dinamika kebijakan/perubahan penganggaran seperti efisiensi anggaran belanja?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?

7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Apabila mengacu kepada matriks di bawah ini yang dimodifikasi lampiran dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka, dengan realisasi sebesar 92,94%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP tahun 2025 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	100-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-83,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2025 Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 maka persentase capaian IKK ini sebesar 103,27%. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Realisasi IK ini melanjutkan tradisi sukses Biro HKLN memenuhi target pada IK yang sama. Melanjutkan rekomendasi dari triwulan I yang dikerjakan sejak triwulan II 2025 dan triwulan III 2025, di triwulan akhir tahun 2025 Biro HKLN melanjutkan upaya persuasif melalui jalur informal memohon perkenan para responden memberi apresiasi setinggi mungkin kepada layanan PDLN yang disajikan Biro HKLN sepanjang triwulan IV 2025. Hasilnya baik yaitu Biro HKLN kembali mampu memenuhi target IKK ini untuk triwulan akhir 2025.

Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi petugas administrasi PDLN pada triwulan IV 2025 adalah:

1. Pemberian layanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas; dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa.

Tidak ada laporan resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) Biro HKLN dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan layanan PDLN sepanjang triwulan IV 2025. Catatan dari hasil survey yang perlu diperhatikan lebih adalah perlunya peningkatan kecepatan dalam pelayanan karena mendapat rerata nilai yang terendah. Akhirnya, perlu diingat bahwa kepiawaian jajaran pimpinan Biro HKLN dalam memotivasi/mendorong para pegawai Biro HKLN untuk bekerja dengan cerdas dan prima serta penuh dedikasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara Indonesia berkontribusi nyata terhadap keberhasilan Biro HKLN memenuhi target IK.

IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI perlu untuk menyusun dokumen Pedoman Delegasi RI (Delri) agar tercipta keseragaman atas posisi Delri dan memudahkan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas Kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MOU's, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, atau work plan/program.

Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
93%	100%	107,53%	93%	100%	107,53%	96%	nihil	104,17%

Tabel 11 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	100%	93%	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam dua tabel di atas, pada tahun 2025 Biro HKLN berhasil memenuhi target IK karena realisasi IK sebesar 100% sehingga capaiannya menjadi 107,53% target IK ini adalah 93%. Sedangkan dibandingkan dengan renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, capaian

IK ini adalah 104,17%. Tidak tersedia standar nasional untuk IK ini yang dapat dipakai atau diacu sebagai pembanding. Selain itu dibanding dengan realisasi dan capaian di triwulan yang sama tahun 2024, maka terjadi perolehan yang sama baik pada realisasi maupun capaian.

IK Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Pada tahun 2025, terdapat 21 (dua puluh satu) target yaitu diterimanya posisi Indonesia pada:

- 1) Dokumen ASEAN Common Understanding and Initiative on Sustainable Small-scale Aquaculture (SSA)
- 2) ASEAN Seafood Alliance
- 3) ASEAN SECTORAL WORKING GROUP ON FISHERIES (ASWGFi)
- 4) ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)
- 5) ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU)
- 6) SEAFDEC Council Director Meeting
- 7) SEAFDEC Program Committee (PCM)
- 8) SEAFDEC Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership
- 9) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- 10) Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
- 11) Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
- 12) Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) -Monitoring and Evaluation Working Group
- 13) CTI CFF_Pre-SOM/SOM ke-20
- 14) Coastal States Alliance (CSA) (*done*)
- 15) Food and Agriculture Organization (FAO)- The Fifth meeting of the Parties of Port State Measures Agreement
- 16) Food and Agriculture Organization (FAO)- Technical Working Group on Information Exchange PSMA
- 17) Our Ocean Conference (OOC) (Tw II/April 2025)
- 18) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- 19) Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Blue Economy (*done*)
- 20) The Third United Nations Ocean Conference (UNOC)
- 21) Arafura and Timor Sea (ATSEA)

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari Tim Kerja kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir tahun 2025, seluruh forum internasional tersebut telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN /KKP dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN dalam memenuhi target IK diantaranya adalah beberapa semua kerja sama multilateral yang mengundang Biro HKLN untuk terlibat sesuai dengan jadwal atau dapat dilaksanakan masih di tahun 2025. Koordinasi dengan organisasi multilateral terkait mengenai jadwal pelaksanaan akan tetap dilanjutkan. Pelaksanaan kegiatan terkait IKK didanai anggaran Biro HKLN dan didukung sumber daya manusia Biro HKLN yang cukup dikenal luas profesionalitas dan integritasnya sehingga tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Rencana di tahun 2026 berikutnya adalah melanjutkan menghadiri pertemuan multilateral yang dijadwalkan di tahun 2026 dan diharapkan semua organisasi kerja sama multilateral mitra Biro HKLN/KKP tidak ada yang memundurkan kegiatan dari jadwal direncanakan.

Gambar 5 Kegiatan CTI-CFF Senior Official Meeting ke-20 di Bali, Indonesia



Gambar 6 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP berpidato dalam forum bergengsi Our Ocean Conference 2025 di Busan, Korea Selatan



IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada Forum Regional/Multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota Organisasi Internasional (OI) dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum Regional/Multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa Komite dan Working Group, antara lain dapat menjadi Presidensi dan Ketua Organ Subsider. Indonesia juga dapat ditunjuk sebagai Host atau Co-Host, sebagai member of Bureau, Member of Council, Member of Board, Coordinator of (Group). Keberhasilan pencalonan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan

Tabel 12 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	nihil	100%

Tabel 13 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Forum regional dan multilateral yang menjadi dasar pemenuhan target Indikator Kinerja ini berjumlah 3 (tiga) yaitu:

1. SEAFDEC Reg Training MCS

Pelaksanaan kegiatan ini dan Kepesertaan:

1. Kegiatan Regional Training Course on Enhancing Capacity for Monitoring Control and Surveillance (MCS) of Domestic and International Fishing Vessels to Combat IUU Fishing diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2025 di Indonesia dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kerja Sama Multilateral, ibu Desri Yanti yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, bapak Sakti Wahyu Trenggono.
2. Pembukaan Regional Training dilaksanakan di Ashley Wahid Hasyim Hotel, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 73-75, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

3. Pelatihan ini diikuti oleh 13 peserta dari tiga negara: Thailand (4 orang), Malaysia (4 orang), dan Indonesia (5 orang), didukung oleh tim Training Department (TD) SEAFDEC (3 orang) dan RFPN Indonesia (1 orang) serta Tim dari Biro HKLN dan Ditjen PSDKP, KKP.
4. Aktivitas pada hari pertama diselenggarakan di Downing Ballroom, Ashley Wahid Hasyim Hotel. Sambutan pembukaan disampaikan oleh Bapak Kongpathai Saraphaivanich dari Training Department – SEAFDEC dimana disampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta, memfasilitasi pertukaran informasi, serta memperkuat kerja sama regional dalam upaya memberantas IUU Fishing demi terwujudnya perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya kelautan.
6. Agenda pelatihan diisi dengan sesi presentasi dari tiga narasumber yang memaparkan topik-topik krusial, meliputi:
 - Pengawasan kapal perikanan domestik.
 - Pengawasan kapal ikan asing, khususnya terkait implementasi Port State Measure (PSM).
 - Pengenalan umum mengenai pemanfaatan teknologi pengawasan perikanan di Indonesia.

2. Ketuanrumahan untuk Proyek OFWG 101 2024A on DSS

"Ketuanrumahan telah terlaksana dengan lancar, melalui pelaksanaan Workshop pada tanggal 23-25 September 2025 di Swissotel Jakarta PIK Avenue. Workshop diikuti perwakilan dari 14 ekonomi anggota APEC termasuk Indonesia yang terdiri dari unsur perwakilan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Perwakilan James Cook University, University of Rhode Island, Rhode Island Department of Environmental Management, Institut Pertanian Bogor dan PT. Inti Solusi Persada yang merupakan mitra IT system developer DJPT menjadi pembahas ahli pada workshop.

Pembahasan pada workshop selanjutnya akan dikembangkan menjadi dokumen proceeding dan rekomendasi kebijakan yang akan menjadi output proyek. BHKLN akan mengawal proses endorsement hingga publikasi dokumen di laman resmi APEC, serta proses pelaporan keseluruhan proyek melalui APEC Project Completion Report. BHKLN juga akan melaporkan pelaksanaan workshop sebagai bentuk pemanfaatan APEC kepada Kementerian Luar Negeri selaku penjuror nasional, serta melaporkannya sebagai bentuk implementasi amanat-amanat APEC oleh Indonesia." Yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan ini adalah Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bapak Dr. H. Mahrus, S.S.T.Pi.

3. RCC Meeting ATSEA

Kegiatan RCC Meeting ATSEA diselenggarakan di Jakarta tanggal 3 sampai 4 Desember 2025 dengan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, bapak Hendra Yusran Siry. Pertemuan telah mengadopsi beberapa keputusan penting yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia, antara lain:

1. Institusionalisasi ATSEA (Sinergi dengan CTI-CFF)
 - a. Disepakati pendekatan hybrid untuk masa transisi menuju integrasi atau asosiasi strategis dengan CTI-CFF yang ditargetkan mulai tahun 2027
 - b. Posisi resmi RCC ini akan segera disampaikan ke Sekretariat CTI-CFF untuk dibahas dalam agenda Senior Officials Meeting (SOM) CTI-CFF pada 8–11 Desember 2025.
 - c. Disepakati upaya re-engagement Timor-Leste melalui forum CTI-CFF agar kembali aktif dalam mekanisme ATSEA

2. Efisiensi Tata Kelola dan Kelompok Kerja (TWG)
 - a. Menerima usulan Indonesia untuk menghindari duplikasi pembentukan Working Group baru. Disepakati untuk menyinergikan isu teknis dengan Technical Working Groups (TWGs) yang sudah ada di organisasi regional lain (seperti CTI-CFF).
 - b. Akan disusun daftar kontak poin teknis (consolidated list of contact points) dari tiap negara untuk memudahkan koordinasi horizontal.
3. Rencana Kerja dan Anggaran 2026
 - a. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, termasuk retensi staf Sekretariat saat ini dan persetujuan rekrutmen staf baru (Senior Policy and Partnership Specialist serta Field Officers) untuk memperkuat implementasi proyek.
 - b. Sekretariat diwajibkan menyampaikan laporan keuangan terperinci tahun 2025 paling lambat akhir atau awal tahun 2026.
4. Mobilisasi Sumber Daya dan Proyek Baru
 - a. Pertemuan mengadopsi posisi Indonesia yang mewajibkan Sekretariat untuk melakukan konsultasi dengan negara anggota sejak tahap konseptualisasi proposal proyek baru. Hal ini untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.
 - b. Dukungan penuh terhadap pengajuan proyek GEF Medium-Sized Project (MSP) ATSEA-3 dan proyek Konservasi Lamun dan Dugong yang didanai MbZ.
5. Adopsi Mitra Pembangunan

Menetapkan Coral Triangle Center (CTC) sebagai Strategic Development Partner (SDP) baru ATSEA, melengkapi kemitraan dengan PEMSEA dan Oil Spill Response Limited (OSRL).
6. Draft Regional Action Plan (RAP) ALDFG

Pertemuan menyetujui perpanjangan waktu pemberian masukan negara hingga 15 Januari 2026²¹. Sekretariat juga ditugaskan untuk mengkaji ulang urgensi pembentukan badan baru (Regional Advisory Body) dibandingkan dengan optimalisasi fungsi Regional Stakeholder Working Group (RSWG) yang sudah ada, sebagaimana menjadi perhatian delegasi Indonesia.
7. Rencana pertemuan selanjutnya
 - a. Pertemuan RCC ke-3 tahun 2026 direncanakan dengan opsi: Indonesia sebagai tuan rumah (sesuai komitmen awal), Australia (menunggu konsultasi internal), atau dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan CTI-CFF.
 - b. Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) ATSEA dipertimbangkan untuk dilaksanakan bersamaan dengan Special Ministerial Meeting CTI-CFF di sela-sela Ocean Impact Summit di Bali pada Juni 2026."

Dengan demikian, di tahun 2025, Biro HKLN memenuhi target IK sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 IK ini, tidak ada perubahan pada realisasi dan capaian. Jika dibandingkan dengan isi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 untuk target IK ini di tahun 2029 maka realisasi Tahun 2025 memenuhi target sehingga capaiannya menjadi 100%. Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional sehingga tidak bisa dilakukan pembandingan. Pencapaian target IK didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN. Diyakini tidak ada inefisiensi pada penggunaan semua sumber daya tersebut.

IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Sumber informasi hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar indeks dihitung dari rerata nilai dimensi input dan dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang akan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2025 dan diumumkan biasanya pada akhir tahun anggaran atau di awal tahun anggaran berikutnya.

Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
97	100	103,08%	95,1	97,14	102,14%	99	nihil	101.01%

Tabel 15 Target dan Realisasi IK Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP tahun 2028 s.d 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,31	87,31	95,1	97,14

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah IKK yang frekuensi penghitungannya bersifat tahunan. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025, dalam rangka mensukseskan Biro HKLN dalam memenuhi target IK ini maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring media sosial terhadap
 - Sejumlah konten di instagram,
 - Sejumlah konten di facebook,
 - Sejumlah konten di tiktok, dan
 - Sejumlah video, short, dan live konten di youtube;
- Monitoring media massa dengan terhadap pemberitaan di media massa
- Pelaksanaan konferensi pers;
- Pelaksanaan Bincang Bahari;
- Pelaksanaan Morning Sea;
- Pembuatan siaran pers;
- Produksi episode podcast;
- Produksi episode KKP News Monthly dan 28 episode KKP News Weekly;
- Penyusunan strategi komunikasi
 - a. Strategi Komunikasi Swasembada Garam
 - b. Optimalisasi Peran Penyuluh Kelautan & Perikanan Sebagai Penyampai Informasi Program & Kebijakan KKP.
 - c. Strategi Publikasi Dapur Emas Nusantara
 - d. Strategi Kampanye Media Hari Segitiga Terumbu Karang
 - e. Strategi Publikasi Launching Stelina

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, tidak terdapat kendala serius di internal Biro HKLN seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan pendanaan. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya masih seputar aktivitas reguler yang terkait dengan pengelolaan layanan produksi dan publikasi produksi video dokumenter.

Pekerjaan terpenting yang dituntaskan dalam Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik (POP) dalam rangka memenuhi target IK ini adalah mengisi Survei Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebaik-baiknya yang tujuannya mengukur kinerja pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di tingkat Kementerian/ Lembaga non Kementerian di tingkat Pusat. Survei dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2025

Berdasarkan hasil pengamatan harian, beberapa hal di bawah ini dapat diyakini sebagai beberapa faktor yang turut menyebabkan Tim Kerja POP sukses memenuhi target IK.

1. Tumbuhnya Rasa Saling Percaya

Saling percaya merupakan fondasi yang penting bagi Tim Kerja POP membangun tim kerja yang efektif. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya, Ketua dan pegawai senior di Tim Kerja POP melakukan beberapa cara seperti menjadi contoh yang baik dengan selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan anggota tim, menunjukkan konsistensi dan transparansi dalam tindakan dan komunikasi dan membangun rasa saling percaya dan hubungan interpersonal yang hangat bersahabat dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena telah sering terbukti keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan semua anggota tim merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap hasil kerja tim.

2. Kesamaan Visi dan Misi

Bagi setiap anggota Tim Kerja POP adalah penting untuk memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi tim. Maka semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama Ketua Tim Kerja POP terus memastikan bahwa visi dan misi tersebut relevan dan *applicable* dalam pekerjaan harian dan melibatkan anggota tim dalam proses pembuatan visi dan misi untuk memastikan bahwa mereka merasa memiliki keterlibatan dan pemahaman yang mendalam.

3. Komunikasi yang Baik di Tim Kerja POP

Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun tim kerja yang efektif. Saluran komunikasi antar anggota tim terbuka dan efektif baik melalui platform elektronik maupun manual sehingga memungkinkan setiap anggota tim untuk berpartisipasi aktif berbagi informasi, ide, dan masalah yang dihadapi. Dampak terhadap anggota tim adalah merasa didengar dan dihargai saat berkomunikasi. Demikian juga Kontribusi setiap anggota tim dapat dianggap menjadi hal penting untuk membangun tim kerja yang efektif. Apresiasi secara terbuka ketika ada anggota tim yang mencapai hasil yang baik atau memberikan ide yang berharga menjadi salah satu budaya positif yang dikembangkan dan dipelihara Tim Kerja POP.

4. Memahami Tanggung Jawab Masing-Masing

Setiap anggota Tim Kerja POP memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Setiap orang tahu apa yang diharapkan darinya dan bagaimana peran mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing memungkinkan anggota tim bekerja secara efisien dan saling mendukung. Terjaganya keselarasan antara tugas dan keahlian anggota tim tidak pernah lepas dari perhatian para jajaran pimpinan. Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat setiap anggota tim membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja semua anggota.

Gambar 7 KKP News Edisi November 2025



Gambar 8 KKP News Edisi Desember 2025



IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik adalah IK baru Biro HKLN yang mulai menjadi tanggung jawab Biro HKLN untuk realisasi dan pencapaiannya pada tahun 2025. Pada hakikatnya, Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Biro HKLN analog dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik terutama karena sama-sama mengacu dan berlandaskan kepada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dimana tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada internal KKP terdiri dari:

- a. perencanaan dan
- b. pelaksanaan

Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik dan Indikator penilaian. Tahapan evaluasi mandiri Keterbukaan Informasi pada KKP terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengumuman. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek dinilai, terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Tabel 16 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
96	100	104,17%	-	-	-	98	nihil	102,04%

Tabel 17 Target dan Realisasi IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana yang ditampilkan dalam kedua tabel di atas terlihat bahwa IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2025 maka pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia informasi realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK yang sama. Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP adalah hasil evaluasi internal yang mengukur sejauh mana KKP sebagai badan publik mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Evaluasi ini dilakukan melalui pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian diverifikasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Hasil verifikasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dapat dilihat melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. Berdasarkan aplikasi tersebut, realisasi IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 adalah 100 di tahun 2025 dan dengan besar target sebesar 96 maka capaiannya menjadi 104,17%. Tangkapan layar aplikasi tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 9 Tangkapan layar aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id untuk memverifikasi Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)	Nilai Uji Publik Total Nilai Juri * 20%	Nilai Akhir	Kualifikasi
100	100	80	17.134	97.134	" Informatif "

I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25
 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10
 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 20
 IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 30
 V. KELEMBAGAAN : 15

Cek Hasil Monev

Kegiatan pemenuhan target kinerja dalam rangka pelaksanaan IK ini di tahun 2025 adalah :

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP melalui pengelolaan layanan informasi publik (Permen KP 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP);
2. Mengelola layanan informasi publik melalui operasionalisasi ruang layanan PPID KKP (GMB III lantai GF);
3. Mengelola kanal layanan informasi publik (call center, e-ppid, email humas & PPID, whatsapp KKP, media sosial KKP);
4. Mengelola laman resmi Kementerian (situs web KKP, portal PPID, situs web perpustakaan KKP/aplikasi Archipelago);
5. Mengembangkan strategi layanan komunikasi dan informasi (SK PPID, pemutakhiran dan penyusunan SOP LIP): 5 pemutakhiran (done) dan 19 penyusunan SOP baru ;
6. Menyiapkan dokumen layanan informasi publik (dokumen hasil-hasil survei LIP: SKM, SPAK dan SPKP): per triwulan;
7. Melaksanakan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik (inisiasi kerja sama dengan BNSP untuk sertifikasi);
8. Melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik internal KKP; dan
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh KIP (Monitoring sedang berlangsung, dan Evaluasi melalui pengisian SAQ akan dilaksanakan kuartal akhir) sehingga hasilnya KKP mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik

Berikut ini informasi mengenai kegiatan penting lainnya atau output terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di KKP:

1. Laporan SPAK, data dukungnya dapat dilihat pada <https://drive.google.com/drive/folders/1Lb2S-9pnsblywKowEFW4GWR8X6JXzgb>
2. Laporan SKM, data dukungnya dapat dilihat pada <https://drive.google.com/drive/folders/1dPpfioikqyttmZ1ZsXcTWreOxc3CfZzQ>
3. BNSP, data dukungnya dapat dilihat pada https://drive.google.com/drive/folders/143k_Ah0T3sBFTKViwxLupuRVFN25fHgH
4. Kick Off dan penganugerahan Monev KIP lingkup KKP <https://drive.google.com/drive/folders/1lwiUqXNiKK9LO6mDA0SiNXN75ccBR5Nm>
5. Sosialisasi monev KIP lingkup KKP Tahun 2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1mjCXWWaSp0nEcYqUPYQtYp6FN-IdqHuf>
6. Pembinaan dan Pendampingan Pengisian Monev KIP lingkup KKP Tahun 2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1ukNHdqV8TlrFbCqkCDpSdTTDV9xZUE9C>
7. Bimtek Tim Penilai Monev, Workshop Penilaian SAQ MONEv Internal KKP dan Validasi Hasil Penilaian https://drive.google.com/drive/folders/1StzmDo6nqhw-_ELKupSghVGSaG-khdf4
8. Workshop Pengisian SAQ Monev

Kegiatan lainnya yang turut menyumbang pada proses pencapaian target indikator kinerja:

1. Penerimaan dan pengolahan permohonan informasi masuk yang terdiri dari:
 - a. Permohonan langsung ke ruang PPID KKPn
 - b. Permohonan melalui aplikasi e-PPID
 - c. Permohonan melalui kanal lainnya (email dan medsos)
2. Penerimaan pengajuan keberatan
3. *Complaint reception* atas layanan BHKLN (SP4N Lapor)

Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Besar target IKK ini berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029 adalah 98. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Beberapa faktor berikut menjelaskan keberhasilan Biro HKLN melalui Tim Kerja Layanan Informasi (LI) memenuhi target IK:

1. Profesionalitas Tim Kerja LI

Tim Kerja LI merupakan terdiri dari sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan di dunia komunikasi dan hubungan masyarakat. Setiap orang di dalam tim kerja LI telah terpilih dengan tepat dan mampu berkompetisi secara sehat sehingga terbangun tim kerja yang efektif dengan lebih mudah dalam mengeksekusi rencana kerja dengan memanfaatkan semua sumber daya tersedia seefisien mungkin. Tim Kerja LI juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan kemauan yang tinggi untuk bekerja sama yang dapat memperkuat dinamika tim secara menyeluruh.

2. Pembagian/distribusi kerja yang jelas

Tujuan dan peran yang jelas pada setiap anggota dalam Tim Kerja LI membuahkan kolaborasi kerja yang efektif. Peran setiap anggota dalam mencapai tujuan telah ditentukan dan diatur dengan meminimalkan terjadinya tumpang tindih atau overlapping dalam pekerjaan. Setiap anggota tim memahami bagaimana peran mereka dalam tim sehingga dapat memberikan kontribusi yang

sesuai dengan peranan masing-masing. Pimpinan di Tim Kerja LI juga berhasil memfasilitasi komunikasi yang terbuka, harmonis dan produktif di dalam tim.

3. Kolaborasi aktif di lingkungan KKP

Kolaborasi yang aktif antara Biro HKLN dan tim-tim kerja lainnya di lingkungan KKP yang menyelenggarakan layanan informasi publik, komunikasi dan kehumasan terbukti menjadi kunci untuk bisa mencapai hasil yang optimal bagi Tim Kerja LI yang notabene berperan sebagai spearhead pemenuhan target IK ini di lingkungan KKP. Anggota Tim Kerja LI terbukti mampu bekerja sama, berbagi pengetahuan, memelihara network dan memanfaatkan keahlian yang dimiliki tak hanya di internal Biro HKLN tapi dengan seluruh tim kerja tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemampuan Tim Kerja LI dalam memanfaatkan fasilitas teknologi yang tersedia untuk memfasilitasi kolaborasi seperti platform kolaboratif online yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi file, mengedit dokumen secara bersamaan, dan berkomunikasi secara real-time juga berkontribusi besar bagi kesuksesan Tim Kerja LI menanggapijawab keberhasilan pemenuhan target IK.

Gambar 10 Pertemuan Para Pejabat dan Staff KKP Dalam Rangka Penilaian Mandiri Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2025



Gambar 11 Penyampaian Materi Sosialisasi Oleh Pakar Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 12 Kerja Keras Tim Kerja Layanan Informasi berbuah manis dengan diterimanya penghargaan Kategori Informatif untuk Kementerian pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 oleh Komisi Informasi Publik



IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pengukuran persentase efektifitas layanan dilakukan dengan penyebaran survei kepada stakeholder (seperti sekretariat Komisi IV DPR, pihak internal KKP, coordinator unjuk rasa dan lain sebagainya) yang telah menerima layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh stakeholder di akhir tahun 2025. Pengukuran dilakukan setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) terhadap layanan-layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan dan atau melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	99,51%	104,75%	89%	96,06%	107,93%	97%	nihil	102,59%

Tabel 19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	92,26%	89%	96,06%

Data pada kedua tabel di atas menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, realisasi untuk IK ini adalah 99,51% dan oleh karena target IK adalah 95% maka capaiannya menjadi 104,75% atau melampaui 100%. Sedangkan pada akhir tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja adalah 96,06% sehingga mengalami peningkatan baik dari segi realisasi dan segi capaian. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir dalam rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu 97% maka capaian dari IK ini adalah 102,59% Se jauh ini, belum pernah ditemukan bahwa ada acuan atau standar yang bisa menjadi pembandingan tingkat nasional apalagi internasional untuk IK ini. Catatan dari hasil survey untuk IK ini adalah agar ke depannya lebih menguatkan koordinasi dengan pihak eksternal/stakeholder pengguna jasa/layanan dari Biro HKLN melalui Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan.

Manual Indikator Kinerja untuk IKK ini menjadi acuan mengenai efektifitas atau kinerja layanan hubungan lembaga dari Biro HKLN yaitu dalam matriks di bawah ini.

%Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00-64,99	Tidak Efektif
65,00-76,60	Kurang Efektif
76,61-88,30	Efektif
88,31-100,00	Sangat Efektif

Berdasarkan matriks di atas, kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang 88,31% sampai dengan 100%. Diperkirakan, kinerja layanan sangat efektif adalah Biro HKLN sangat memuaskan para pengguna jasa layanan yaitu mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan misalnya seperti memberikan respon yang cepat dan tepat jika ditanya, memberikan informasi rencana layanan yang cukup dengan tidak terlambat, dan lain sebagainya.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Pengalaman tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan prima hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan membuat tim kerja Komunikasi Kelembagaan sigap dan tangkas untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan hubungan kelembagaan
- Dukungan anggaran dapat dikatakan memadai untuk tim Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan untuk menyediakan layanan prima dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP/Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam bekerja efektif dan efisien dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan, dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif

Layanan hubungan lembaga yang diberikan kepada stakeholder pada akhir 2025 adalah pada kegiatan sebagai berikut:

1. Unjuk rasa
 - a. Koalisi Pemerhati Pertambangan Sultra dan GMII Terkait Perizinan PKKPRL PT Tridayajaya Mandiri Nusantara
 - b. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi Terkait Dugaan Korupsi BBM Kapal Pengawas Perikanan dan Mark-up Anggaran Pengadaan Bandwith Internet Kantor Pusat KKP tanggal
 - c. Koalisi Pemerhati Pertambangan Sultra dan GMII Terkait Perizinan PKKPRL PT Tridayajaya Mandiri Nusantara
 - d. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi Terkait Dugaan Korupsi BBM Kapal Pengawas Perikanan dan Mark-up Anggaran Pengadaan Bandwith Internet Kantor Pusat KKP tanggal
2. Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
3. Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumsel
4. Pendampingan Menteri Pada Kegiatan Puncak Hari Ikan Nasional

Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN mengawal pejabat KKP yang terlibat dalam semua kegiatan di atas selama tahun 2025. Dalam rangka mengetahui efektifitas layanan oleh Biro HKLN maka dilakukan pembagian kuisioner online kepada stakeholder Biro HKLN yang merupakan rekan-rekan pegawai Biro HKLN bertugas dan berkoordinasi dengan Biro HKLN sejak masa pra-pelaksanaan di masing-masing lokasi untuk membantu dan mengusahakan fasilitasi kegiatan sebaik mungkin.

Hingga akhir tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi

yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dalam rangka pemenuhan target IK adalah tetap memberikan layanan prima hubungan kelembagaan sesuai dengan arahan, bimbingan dan penugasan dari Kepala Biro HKLN.

Gambar 13 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan Wamen KP



Gambar 14 Layanan Hubungan Lembaga Biro HKLN kepada Menteri KP dan Ketua Komisi IV DPR RI



IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan diperoleh melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan III tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada matriks di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	100-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-83,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang triwulan terakhir 2025, terdapat 14 orang responden yang menerima layanan perpustakaan dengan jenis sebagai berikut:

- Layanan keanggotaan
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan/baca di tempat
- Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi)
- Layanan penelusuran informasi
- Layanan Bimbingan Pemustaka (Pendidikan Pemustaka, Bimbingan Literasi, Orientasi Perpustakaan), dan
- Layanan anak

Tabel 20 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
90	95,37	105,97%	88	90,93	103,33%	94	Nihil	101,46%

Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2004	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	88,48	88	90,93

Sebagaimana ditampilkan dalam 2 tabel di atas, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan terakhir 2025 adalah 95,37. Dengan target pada Triwulan terakhir 2025 sebesar 90 maka capaian IK ini adalah 105,97%. Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah ‘Sangat Baik’ karena realisasi sebesar 95,37 masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100. Dibandingkan dengan target terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 94 maka capaian IK adalah 101,46%.

Faktor pendukung keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK adalah arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN tidak pernah diabaikan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mewujudkan karya, karsa dan kerja dalam rangka memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para *customer* perpustakaan KKP. Hingga akhir tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan di tahun anggaran berikutnya dalam rangka pemenuhan target IK ini adalah melanjutkan pemberian layanan reguler perpustakaan KKP dengan memberi perhatian yang lebih lagi kepada aspek standar pelayanan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan di waktu selanjutnya dari hasil survey kepuasan adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Tentu saja penanganan hal ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran dan perencanaan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan KKP. Beberapa kegiatan Perpustakaan di triwulan terakhir tahun 2025 yang turut menunjang keberhasilan kinerja Biro HKLN memenuhi target IK adalah:

1. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Siswa SD Victory Plus
2. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada siswa TK Istiqlal Jakarta
3. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada kepada siswa TK Labschool Jakarta
4. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada mahasiswa Prodi Oseanografi ITB
5. Archipelago Bookclub Vol. 2
6. Penjajakan Kerja sama bidang perpustakaan dengan Prodi D3 Informasi, Arsip, dan Perpustakaan, Universitas Negeri Padang
7. Lomba Mewarnai dan edukasi literasi sektor kelautan dan perikanan tingkat SD dalam rangka Hari Ikan Nasional 2025
8. Penyerahan donasi bahan bacaan kepada Yayasan Sofiyatul Amaliyyah Medane

Gambar 15 Pemberian Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada para siswa TK Istiqlal Jakarta



Gambar 16 Layanan Prima Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Perpustakaan KKP kepada Mahasiswa Oseanografi ITB



Gambar 17 Layanan Prima Perpustakaan KKP Dalam Sesi Berbagi *Bookclub*



IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 22 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
87	87	100%	84	85,80	102,14%	87,8	nihil	99,09%

Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2018 s.d. 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	83,30	84	85,80

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja telah tersedia di akhir Tahun 2025 yaitu sebesar 87. Besar targetnya adalah 87 sehingga capaian IK menjadi 100%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, terjadi peningkatan besar realisasi IK ini meskipun terjadi penurunan besar capaian dari 102,14% menjadi 100%. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena besar target meningkat dari tahun 2023 sebesar 84 menjadi 87 di tahun 2025 sehingga secara matematis terdapat peningkatan besar bilangan pembilang. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 target IK ini di tahun 2029 adalah 87,8 maka realisasi Tahun 2025 hampir memenuhi target sehingga capaiannya 99,09%.

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan berpedoman kepada Permen PAN RB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi diantaranya mencakup:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Penilaian Mandiri level II Lingkup Setjen telah dilakukan pada medio tahun 2025 bersama dengan tim dari Inspektorat I KKP dengan melakukan verifikasi terhadap 4 komponen penilaian evaluasi SAKIP dengan menggunakan aplikasi kinerjaku yang memiliki bobot masing-masing komponen. Hasil verifikasi di Tahun 2025 dan sebelumnya terangkum dalam matriks komponen dan bobot penilaian sebagaimana tersaji di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	26,10	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10	12,60	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,00	21,00	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	83,30	85,80	87,00
	Predikat Penilaian		A (memuaskan)	A (memuaskan)	A (memuaskan)

Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode tahun 2025. Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh pihak terkait adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil).

Rekomendasi SAKIP untuk Biro HKLN tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN Nomor : B.936/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro HKLN tahun 2025 dan tindak lanjut atas rekomendasi terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024.	Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN naik dari tahun 2024 sebesar 103,59 menjadi 104,41 di tahun 2025.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/4r1f54q dan https://bit.ly/4b2Ai9j
2.	Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dilakukan setiap triwulan dan terukur sepanjang 2025.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/4sIEIIV dan https://bit.ly/4b2Ai9j
3.	Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja	Sejak Maret 2025 Biro HKLN mengembangkan inovasi sosiokultural dengan melakukan acara doa bersama Biro HKLN sepekan sekali dalam rangka menyegarkan kerohanian karena diyakini berimplikasi positif terhadap upaya peningkatan kinerja individu dan organisasi.	Sudah ditindak lanjut	https://bit.ly/45QCQMR dan https://bit.ly/4b2Ai9j

Aksi yang dilakukan dalam rangka persiapan PM SAKIP oleh BHKLN di tahun berikutnya adalah pemenuhan seluruh aspek penilaian pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi).

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
82	85,64	104,44%	85	85,58	100,68%	84	nihil	101,95%

Tabel 25 Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 s.d 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	71	69,74	72	54,95	73	77,53	78	79,29	79	84,45	85	85,58

Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi Pemerintah nomor : Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025 menunjukkan bahwa perolehan Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2025 adalah 85,64. Jika dibandingkan dengan realisasi IK ini di tahun 2024 yang sebesar 85,57 maka terjadi peningkatan pemerolehan besar indeks.

Target IKU ini di tahun 2025 adalah 82, oleh karena realisasi melampaui target maka capaiannya menjadi 104,44%. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal yang adalah 84, realisasi Biro HKLN tahun 2025 mampu melampaui target jangka menengah sehingga besar capaian menjadi 101,95%. Jika dibandingkan dengan hasil IK yang sama di tahun 2024 maka terjadi peningkatan besar realisasi dan capaiannya.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal, peringkat Biro HKLN adalah di posisi ke-10 untuk perolehan realisasi IK ini. Mudah-mudahan di tahun 2026 Biro HKLN mampu menaikkan peringkat. Detail perolehan IK ini di lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam gambar *screen capture* dari Nota Dinas Biro SDMAOP di bawah ini.

Gambar 18 Screen capture Nilai IP ASN 2025 lingkup Sekretariat Jenderal

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Biro HKLN berhasil memenuhi target IK karena memperhatikan arahan Biro SDMAOP seperti:

- Melakukan pemutakhiran data Pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi
- Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti diklat fungsional khususnya yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu
- Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning
- Mengusulkan tugas dan izin belajar ke Badan RSDMKP
- Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai, dan
- Penerapan hukuman disiplin bagi pegawai (jika ada)

Upaya yang dilakukan Biro HKLN untuk memenuhi target IK dititikberatkan pada:

- penyampaian imbauan melalui grup aplikasi whatsapp agar setiap PNS Biro HKLN melakukan update data pelatihan (seperti seminar, webinar dan kegiatan sejenis lainnya)
- pemutakhiran data pendidikan terakhir dan pelatihan
- memberikan asistensi atau pendampingan kepada PNS Biro HKLN mengenai tutorial melakukan update di akunnya masing-masing, dan
- Berbagi informasi di media sosial Biro HKLN tentang brosur atau poster rencana penyelenggaraan webinar, seminar dan lain sebagainya khususnya yang tanpa dikenakan biaya sehingga bisa diikuti ASN Biro HKLN dalam rangka menambah wawasan dan kapasitas.

Pada akhirnya, perlu juga untuk menjadi perhatian para pembaca laporan kinerja bahwa sepanjang tahun 2025 sangat diyakini tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini.

IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK dan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Masih berdasarkan Peraturan yang sama, pejabat yang merupakan satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dimana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diwajibkan oleh *competent authority*.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Frekuensi perhitungan pada IKU ini dilakukan secara tahunan dengan capaian yang akan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Keuangan atau Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	nihil	100%

Tabel 27 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 s.d 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil yang diterima oleh Biro HKLN yang sumber asalnya eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, realisasi IK ini di tahun 2025 adalah 100%.

Target IK ini tahun 2025 adalah 100% sehingga capaian tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% \\
 &= (100\% / 100\%) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Target jangka menengah adalah 100% oleh karena itu capaian IKU ini apabila didasarkan pada target akhir jangka menengah 2025-2029 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2025 memenuhi target sehingga capaiannya 100%.

Beberapa hal yang sudah dilakukan Biro HKLN sepanjang tahun 2025 dalam mendukung pencapaian target IK seperti:

1. Menindaklanjuti temuan tahun sebelumnya (apabila terdapat);
2. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Melakukan inventarisasi;
4. Mereviu laporan keuangan;
5. Menyelesaikan catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
6. Perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
7. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
8. Mengikuti pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis, dan
9. Koordinasi dengan Biro Keuangan.

Besar temuan untuk Biro HKLN di tahun 2025 adalah 0 (nol). Perbandingan realisasi Biro HKLN di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam gambar *screen capture* di bawah ini.

Gambar 19 Screen capture hasil Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyelesaian Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Biro HKLN	-	-	-	100
7	Pusdatin	-	-	-	100
8	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
9	BPISDKP	-	-	-	100
10	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100

IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. akhir Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh mitra kerja di Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan

Tabel 28 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
85%	100%	117,65%	100%	100%	100%	89%	nihil	112,36%

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	80%	69%	60%	100%	65%	65%	70%	83,33%	75%	75%	100%	100%

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2025 adalah 100%, dengan target sebesar 85% maka capaiannya menjadi 117,65%. Dibandingkan dengan capaian untuk IK yang sama di tahun 2024 maka terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 yaitu sebesar 89% maka capaian IKK menjadi 112,35%.

Realisasi indikator kinerja ini adalah berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2025 kepada Kepala Biro HKLN hal 'Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025'. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan terdapat 0 (nol) rekomendasi untuk Biro HKLN pada Tahun 2025 sehingga tidak rekomendasi yang harus ditindak lanjut tuntas. Hal tersebut menjadi faktor utama keberhasilan Biro HKLN mencapai besar target Indikator Kinerja ini di Tahun 2024. Nilai kinerja organisasi Biro HKLN yang mencapai angka di atas 100 semakin meyakinkan semua pihak bahwa secara kuantitatif realisasi Indikator Kinerja ini berpengaruh positif terhadap kinerja Biro HKLN secara keseluruhan selama Tahun 2025.

Faktor-faktor lain khususnya di internal Biro HKLN yang dapat dipercaya menjadi penyebab keberhasilan pemenuhan target IKU ini selama 2025 adalah sebagai berikut:

- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN senantiasa memperhatikan dan sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi resmi butir-butir rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Tim satker Biro HKLN yang memiliki budaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta sangat menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral pasti berguna dalam perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;

- Ketersediaan sumber daya Biro HKLN khususnya sumber daya manusia yang menjadi penanggung jawab langsung untuk pelaksanaan IKU ini selain memadai juga efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja dan 2 (dua) orang profesional karena memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat dengan ditunjang pengalaman kerja bertahun-tahun.
- Kegiatan dalam rencana aksi yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan bisa dilakukan dengan lengkap di tahun 2025.

Perbandingan realisasi IK Biro HKLN dibandingkan dengan satuan kerja atau unit kerja lain lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam gambar screen capture laporan dari Biro Keuangan Bersama Inspektorat Jenderal di bawah ini dimana seluruh unit kerja mampu menyamai Biro HKLN yaitu memenuhi target IK ini di tahun 2025.

Gambar 20 *Screen capture* hasil Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Humas dan KLN	0	n/a	100%	0	0%
6	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	Puskajis	0	0	100%	0	0%
9	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
10	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0%

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi dan evaluasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN untuk IK ini. Tidak termonitor adanya indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang Tahun 2025.

IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Di tahun 2025, yang diajukan Biro HKLN adalah Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik.

Di akhir tahun 2025, Rancangan Keputusan Menteri tersebut telah rampung dan diundangkan sebagai 'Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029'. Oleh karena itu, realisasi IK Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 menjadi 100% sehingga capaiannya menjadi 100%.

Tabel 30 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	nihil	100%

Tabel 31 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2018 s.d. 2024

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Besar realisasi dan capaian IK ini di Tahun 2025 dan tahun sebelumnya adalah sama 100%. Jika dibandingkan dengan isi Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2025-2029, realisasi IK ini telah memenuhi target di tahun 2029 yang juga sebesar 100%. Sampai akhir tahun 2025 tidak tersedia informasi mengenai data dari Unit Kerja/Kementerian atau standard Nasional/Internasional yang dapat digunakan sebagai pembanding Biro HKLN dalam realisasi IKU Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tiadanya berita resmi terkait maka dapat disimpulkan bahwa nihil adanya indikasi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung maupun tidak langsung sepanjang Tahun 2025.

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian IKU adalah:

- Rapat dengan Biro Hukum dan Organisasi, unit kerja Eselon 2 lingkup Setjen dan unit-unit kerja kehumasan eselon 1 lingkup KKP lainnya secara *offline* dan *online* guna penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri berjalan sesuai jadwal dan lancar
- Literatur yang cukup dan didukung dengan masukan dari para pejabat KKP yang notabene menjadi pakar arah kebijakan layanan prima penyediaan informasi publik, dan
- Tim kerja LI selalu memantau dan berpartisipasi membahas substansi dan hal-hal pendukung dalam rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Biro Hukum dan unit-unit kerja lainnya di lingkup KKP dan pihak eksternal; dan

IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro HKLN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro HKLN

Tabel 32 Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2024

Tahun 2025			Tahun 2024			Target Renstra Setjen 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	98,72%	103,92%	95%	99,52%	104,76%	≥95%	nihil	103,92%

Tabel 33 Realisasi dan Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2017 s.d 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	99,69%	-	99,48%	-	99,15%	-	98,90%	-	99,62%	95%	98,68%	95%	99,55%	95%	99,52%

Berdasarkan data dari tabel di atas maka diketahui bahwa realisasi IK di tahun 2024 adalah 98,72% atau sedikit turun dari tahun 2024 yang sebesar 99,52% . Oleh karena target IK ini di tahun 2025 adalah 95% maka capaian IK adalah 103,92%. Jika dibandingkan dengan Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 untuk target IK ini di Tahun 2029 maka realisasi Tahun 2025 melampaui target sehingga capaiannya 103,92%.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode Tahun 2025 karena pada kenyataannya tidak ada berita laporan atau berita resminya.

Sejauh ini belum tersedia data realisasi dan standar untuk IK ini baik di tingkat kementerian, nasional dan internasional sehingga tidak bisa dilakukan komparasi. Hal penting yang patut disorot adalah tidak pernah diterima laporan resmi yang menyebutkan bahwa sudah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia atau sumber daya Biro HKLN lainnya pada semua kegiatan yang mendukung pencapaian target IK ini sepanjang tahun 2025.

Beberapa hal yang disampaikan di bawah ini diperkirakan menjadi penyebab keberhasilan Biro HKLN memenuhi target IKU ini di tahun 2025:

- Percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sudah dilakukan sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel, jika diperlukan dan diberi arahan pimpinan
- Optimalisasi pencapaian IK termasuk dengan menggunakan metode daring atau virtual untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan memerlukan tatap muka
- Optimalisasi atas sisa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan prioritas dikerjakan berdasarkan arahan pimpinan
- Para pegawai Biro HKLN yang bertugas mengelola anggaran melakukan pemantauan progres penyelesaian sesuai dengan jadwal, dan
- Pegawai Biro HKLN yang berkompeten tidak tak diberikan akses untuk melakukan pemantuan posisi kas keuangan Biro HKLN dengan disiplin dan berkala dengan frekuensi lebih rapat seperti harian serta berdasarkan arahan pimpinan

Dibandingkan dengan realisasi IK yang sama pada unit kerja lain di lingkup Sekretariat Jenderal, peringkat Biro HKLN bukan yang terbawah. Adapun realisasi IK Biro HKLN bersama unit kerja lainnya dapat dilihat dalam *screen capture* dari laporan Biro Keuangan di bawah ini.

Gambar 21 *Screen capture* realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025

UNIT ESELON II	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	SP2D		
				REALISASI	SISA DANA	%
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>	<i>e</i>	<i>f = d - e</i>	<i>g</i>
BIRO PERENCANAAN	62.494.539.000	762.845.000	61.731.694.000	60.407.471.363	1.324.222.637	97,85%
BIRO KEUANGAN DAN BMN	3.625.823.000	-	3.625.823.000	3.624.713.561	1.109.439	99,97%
BIRO SDMAO	2.097.327.000	-	2.097.327.000	2.096.849.639	477.361	99,98%
BIRO HUKUM	2.073.387.000	-	2.073.387.000	2.071.670.301	1.716.699	99,92%
BIRO HUMAS DAN KLN	11.711.588.000	4.701.857.000	7.009.731.000	6.920.130.894	89.600.106	98,72%
BIRO UMUM	316.512.546.000	24.121.096.000	292.391.450.000	292.069.260.879	322.189.121	99,89%
BIRO PBJ	1.171.936.000	-	1.171.936.000	1.161.605.466	10.330.534	99,12%
BADAN OTORITA PPJ	16.893.018.000	15.650.066.000	1.242.952.000	791.959.438	450.992.562	63,72%
PUSDATIN	156.037.602.000	10.000.000.000	146.037.602.000	145.939.649.180	97.952.820	99,93%
TOTAL	572.617.766.000	55.235.864.000	517.381.902.000	515.083.310.721	2.298.591.279	99,56%

Realisasi Anggaran

Data penyerapan anggaran sampai Desember 2025 tersaji dalam matriks di bawah ini.

KRO	Bagian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Serapan
2322.PEC	Layanan Kerja Sama Bilateral	Rp455,530,000	Rp455,389,610	Rp140,390	99,97%
2322.PEC	Layanan Kerja Sama Multilateral	Rp342,613,000	Rp339,600,739	Rp3,012,261	99,12%
2328.BMB	Layanan Komunikasi Publik	Rp2,175,147,000	Rp2,138,293,803	Rp36,853,197	98,31%
2328.BMB	Layanan Informasi Publik	Rp488,142,000	Rp487,169,451	Rp972,549	99,80%
2328.BMB	Layanan Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	Rp168,626,000	Rp168,624,800	Rp1,200	99,99%
2328.EBA.958	Layanan Humas	Rp10,251,000	Rp10,251,000		100%
2328.EBA.962	Layanan Umum	Rp1,293,603,000	Rp1,263,493,567	Rp30,109,433	97,67%
2328.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp1,085,819,000	Rp1,076,449,354	Rp9,369,646	99,14%
2328.EBB	Video Dokumenter	Rp990,000,000	Rp980,858,570	Rp9,141,430	99,08%
Jumlah		Rp7,009,731,000	Rp6,920,130,894	Rp89,600,106	98,72%

Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2024

Sejalan dengan informasi yang telah disampaikan di atas, realisasi anggaran Biro HKLN per 31 Desember 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebesar Rp6.920.130.894,00 dari pagu efektif sebesar Rp7.009.731.000,00 atau persentasenya sebesar 98,72%.

a. Efisiensi penggunaan sumber daya di dalam Laporan Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan kinerja, sumber daya adalah seluruh input strategis yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Anggaran salah satu sumber daya yang dapat diukur capaian efisiensinya. Efisiensi anggaran merupakan upaya strategis dalam memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan efisiensi anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, prioritas, serta *value for money*, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian program dan kegiatan.

Dalam implementasinya, efisiensi anggaran diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian belanja yang lebih selektif. Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap capaian indikator kinerja utama tetap menjadi prioritas, sementara kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau kurang mendukung output dan outcome program dilakukan rasionalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil yang ditargetkan.

Selain itu, efisiensi anggaran juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sinergi antarunit kerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Melalui penerapan efisiensi anggaran yang konsisten, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berbagai upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan, antara lain melalui pengelolaan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, penataan organisasi yang lebih ramping, penerapan pola kerja baru, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemanfaatan teknologi informasi yang andal, serta efisiensi anggaran. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mendorong penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta peningkatan inovasi dan kolaborasi antar-instansi.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia. Data yang digunakan dalam pengukuran efisiensi meliputi data capaian kinerja sasaran kinerja kegiatan, data pagu anggaran, dan data realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase realisasi anggaran sebagai input terhadap persentase capaian kinerja sebagai output dan outcome, yang dinyatakan dalam bentuk rasio efisiensi.

No	Sasaran Program	Anggaran (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%Realisasi Anggaran terhadap Pagu DIPA	%Realisasi Anggaran terhadap Anggaran Efektif	Nilai Pencapaian Sasaran Program (Sumber Aplikasi Kinerja)	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Pagu DIPA	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Anggaran Efektif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=7/9	=8/9
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP	589.607.792.000	59.072.224.000	530.535.568.000	527.689.838.422	89,50	99,46	107,11	0,84	0,01
2	Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama	5.500.000.000	2.300.000.000	3.200.000.000	3.159.040.000	57,44	98,72	104,41	0,55	0,95
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	6.211.588.000	2.401.587.000	3.810.001.000	3.761.232.987	60,55	98,72	104,41	0,58	0,95

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan dan Aplikasi Kinerja (diolah)

b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai umpan balik Perencanaan 2026

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencapaian target IK Biro HKLN periode Tahun 2025 adalah pada tahun anggaran selanjutnya, frekuensi pengukuran untuk IK Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan hendaknya diubah menjadi tahunan atau setidaknya semesteran. Alasan perubahan adalah responden dari kuisioner pada kedua IKK tersebut adalah orang yang sama sehingga berpotensi rentan mengalami bosan untuk mengisi kuisioner setiap tiga bulan. Walaupun demikian, keputusan final berada di tangan Inspektorat Jenderal bersama/atau Biro Perencanaan.

Tindak lanjut berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 termaktub dalam tabel berikut:

Tabel 34 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN PENDUKUNG
1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi dokumen kesepakatan kerja sama bilateral (rapat koordinasi, keterlibatan KKP dalam pelatihan dengan negara mitra)
2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	- Pemberian layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP - Mempercepat waktu layanan di Biro HKLN
3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	Perumusan dan penyampaian posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional
4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengusulan pencalonan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional
5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	Koordinasi seluruh tahapan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada dimensi input meliputi: Sumber Daya Manusia & Anggaran 1. Bahan Informasi 2. Sarana dan Prasarana 3. Media dan Saluran Komunikasi 4. Pengumpulan data dalam rangka perencanaan program 5. Perencanaan 6. Pelaksanaan

		7. Monitoring dan Evaluasi 8. Program Inovasi
6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	Penilaian LKE KIP
7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran di sektor KP dan melaksanakan pelayanan yang efektif pada lembaga mitra pada kegiatan sebagai berikut. 1. Pendampingan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2. Pendampingan Kunjungan Kerja masa Reses atau Kunjungan Kerja spesifik 3. Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan 4. Unjuk rasa
8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	Pelaksanaan kegiatan pelayanan pada 9 unsur penilaian pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedu 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana (lebih diperhatikan)
9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	Pemenuhan seluruh aspek penilaian pada LKE
10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	Keikutsertaan pegawai Biro HKLN pada pelatihan
11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan
13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	Penyampaian realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala

c. Penghargaan

Kementerian Kelautan Perikanan melalui Biro HKLN pada tanggal 15 Desember 2025 menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Penghargaan ini diterima langsung oleh pejabat pimpinan Tinggi KKP mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan dan membanggakan para karyawan KKP.

Gambar 22 Penghargaan Komisi Informasi Pusat untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 23 Pejabat Pimpinan Tinggi KKP menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat



d. Penyesuaian Anggaran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pegawai di Kelompok Kerja Dukungan Manajerial terhadap aktivitas sumber daya manusia Biro HKLN yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan-kegiatan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Biro HKLN sepanjang tahun 2025,

dinamika anggaran yang terjadi di awal tahun fiskal 2025 karena kebijakan efisiensi tidak mempengaruhi secara nyata terhadap kinerja sumber daya manusia Biro HKLN dalam berkinerja melalui kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pencapaian target Indikator Kinerja. Tentu saja faktor pendukung utama keberhasilan adalah kebijaksanaan dan kepiawaian Kepala Biro HKLN dalam mengorkestrasi segenap sumber daya manusia Biro HKLN sepanjang tahun 2025.

Pagu awal BHKLN untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.675.222.000. Selanjutnya, terdapat revisi anggaran sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan efisiensi sehingga pagu efektif BHKLN menjadi Rp 3.104.170.000 (blokir anggaran sebesar Rp 26.803.132.000 atau sebesar 93,47% dari pagu awal).

Sehubungan dengan terdapatnya alokasi pembiayaan esensial yang belum terakomodir, khususnya terkait gaji PPNPN, tenaga kehumasan dan tenaga kesekretariatan serta pengawasan kegiatan Pimpinan untuk diseminasi program prioritas KKP, sehingga dilakukan relaksasi anggaran sehingga pagu efektif BHKLN yang semula hanya sebesar Rp 3.104.170.000 menjadi Rp 7.009.731.000 yang secara rinci dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

Kode	Pagu Awal	Pagu Efektif	Relaksasi	Pagu Efektif Setelah Relaksasi
2322.PEC	5,500,000,000	798,143,000	-	798,143,000
2328.BMB	12,191,014,000	1,578,368,000	1,253,547,000	2,831,915,000
2328.EBA.958	3,206,000,000	10,251,000	-	10,251,000
2328.EBA.962.052	1,453,003,000	32,350,000	1,356,453,000	1,388,803,000
2328.EBA.994.002.L	4,135,205,000	685,058,000	305,561,000	990,619,000
2328.EBB.053.B	2,190,000,000	0	990,000,000	990,000,000
Jumlah	28,675,222,000	3,104,170,000	3,905,561,000	7,009,731,000

e. Evaluasi pencapaian kinerja

Above all, Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,41 adalah inti dari evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Indikator Kinerja Biro HKLN selama tahun 2025 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, predikat yang diperoleh oleh Biro HKLN adalah 'baik'. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lema 'baik' memiliki beberapa definisi, diantaranya yang relevan dengan laporan kinerja ini adalah:

- elok
- apik
- teratur
- tidak ada celanya

Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas secara keseluruhan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Biro HKLN sepanjang tahun 2025 tidak tak berguna dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP serta pembangunan sektor kelautan dan sektor perikanan Indonesia.

f. Perubahan budaya kinerja

Definisi dari istilah 'budaya' menurut Bapak Antropologi Indonesia yakni Prof. Koentjaraningrat (alm) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Definisi ini cukup sejalan dengan definisi

dari frasa *'performance culture'* dari sebuah sumber yang dipercaya kredibel di internet yang terjemahan bebasnya ke dalam Bahasa Indonesia adalah 'budaya kinerja' yaitu *'A system that engages, develops, and inspires a diverse, high-performing workforce by creating, implementing, and maintaining effective performance management strategies, practices, and activities that support mission objectives.'* Terjemahan bebas dari definisi *'performance culture'* atau 'budaya kinerja' tersebut adalah 'Sistem yang mengikat, mengembangkan dan menginspirasi tenaga kerja yang beragam dan berkinerja tinggi melalui pembentukan, pelaksanaan dan pemeliharaan strategi, praktik dan kegiatan manajemen kinerja guna mendukung pencapaian tujuan.'

Berdasarkan definisi *'performance culture'* di atas dan berdasarkan hasil komunikasi informal dengan beberapa pegawai senior di Biro HKLN maka dapat disimpulkan bahwa Biro HKLN telah lama memiliki sistem kinerja yang cakap atau mumpuni (*excellent*). Hal ini terutama didorong oleh para pegawai yang mengerjakan tugas dan berfungsi mengelola hubungan internasional memiliki horizon berpikir atau wawasan yang tidak hanya dibatasi domestik namun mendunia dan ditularkan kepada pegawai yang mengurus kehumasan dan komunikasi. Apalagi pegawai yang menangani hubungan dengan negara-negara maju di Eropa, Asia dan Amerika Utara tidak jarang mempengaruhi para pegawai lainnya untuk bergairah dalam mencontoh sumber daya manusia dari negara maju dalam bekerja dan bekarya.

Dengan demikian dapat disimpulkan kalau pelaksanaan SAKIP di Biro HKLN selama tahun 2025 tidak mengubah sistem atau *'performance culture'* yang sejak lama dihayati dan diamalkan di organisasi birokrasi dan sumber daya manusia aparatur Biro HKLN secara signifikan. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKIP sulit dipungkiri telah memberikan warna baru dan nuansa yang lebih segar yang tentu saja mendukung produktivitas kerja dan kondusivitas serta sinergi antar sumber daya manusia aparatur baik dalam kerangka hubungan horizontal dan hubungan vertical yaitu antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik.

Gambar 24 Rutinitas Doa Bersama Sekali Sepekan Sebagai Salah Satu *Improvement* sekaligus Inovasi Sosiokultural Biro HKLN yang dapat menunjang kinerja individu dan organisasi



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Realisasi seluruh indikator kinerja tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2025 adalah:
 - a. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 95%, realisasi 100% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerja menjadi 105,26%
 - b. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 92,94% sehingga capaiannya adalah 105,61%
 - c. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 93%, realisasi 100%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerja adalah 107,53%
 - d. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan, target IK ini adalah 100% sementara realisasi IK mencapai angka 100% sehingga capaiannya adalah 100%
 - e. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP, target IK ini adalah 97 sementara realisasi IK mencapai 100 sehingga capaiannya adalah 103,09%
 - f. Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP, target IK ini adalah 96 sementara realisasi IK mencapai 100 maka capaiannya adalah 104,17%
 - g. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 99,51% Target IK ini adalah 95% maka capaiannya menjadi 104,75%
 - h. Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP, realisasi IKU sebesar 95,37% dengan besar target yaitu 90%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 105,97%
 - i. Nilai PM SAKIP Biro HKLN, target IK ini adalah 87 dan realisasi IK adalah 87 maka capaiannya adalah 100%
 - j. Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN. Target IK sebesar 82 dan realisasi 85,64. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerja adalah 104,44%
 - k. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN. Target IK ini di tahun 2025 adalah 100 dan realisasinya 100 maka capaiannya adalah 100%
 - l. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100%. Target IKU ini adalah 85% sehingga capaiannya menjadi 117,65%
 - m. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri. Target sebesar 100% dan realisasinya 100% maka capaiannya menjadi 100%
 - n. Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN, target IK ini di tahun 2025 adalah 95 dan realisasinya 98,72 maka capaiannya adalah 103,92%
2. Pemenuhan target Indikator Kinerja Biro HKLN di tahun 2025 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP alokasi untuk Biro HKLN secara efektif dan efisien serta pendayagunaan sumber daya manusia Biro HKLN.

Saran

Pada tahun 2026 perlu ditingkatkan beberapa aspek pada Indikator Kinerja berikut, yakni:

1. Aspek kecepatan pelayanan di internal Biro HKLN untuk Indikator Kinerja Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Aspek koordinasi dengan pihak eksternal pada Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan
3. Aspek kualitas sarana dan prasarana pada Indikator Kinerja Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN Januari 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setien@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ari Prabowo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 29 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

*Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

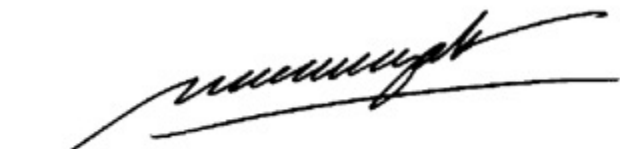
Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	23.175.222.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		28.672.222.000

Jakarta, : Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri


Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Ali Prabowo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zaki Mubarok**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Zaki Mubarok

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

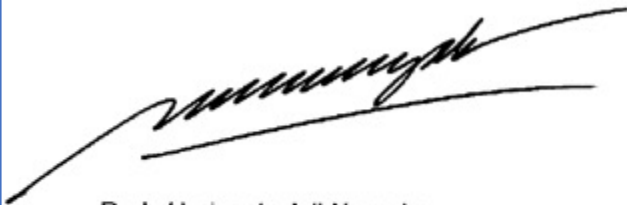
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	23.175.222.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		28.672.222.000

Jakarta, 29 April 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Zaki Mubarak



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zaki Mubarok**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Ditandatangani
Secara Elektronik

Zaki Mubarok

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	82
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	6.211.588.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		11.711.588.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Zaki Mubarak